

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

Ilyas Baharudin Syahputra ¹, Dyah Puspaningrum ², Findari Nurul Fatimah ³, Nila Nurdianal Ngazizah ⁴

¹²³⁴Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Correspondence		
Email: ilyasbaharudin64@gmail.com ¹ , decapuspa9f@gmail.com ² , findarifnf.9a@gmail.com ³ , nilangazizah@gmail.com ⁴	No. Telp:	
Submitted 10 Juni 2025	Accepted 13 Juni 2025	Published 14 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah provinsi Jawa Timur di 34 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 27. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur. Secara parsial, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi kemandirian daerah secara substansial senilai 88,8%.

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kemandirian Daerah; SPSS 27.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of regional tax revenues and regional levies on the regional independence of East Java province in 34 districts/cities. The type of data used is secondary data in the form of regional tax revenue and retribution data obtained through documentation techniques. The analysis method used is multiple linear regression with the help of SPSS 27 software. Before conducting the regression analysis, a classical assumption test was carried out which included normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests to ensure the validity of the model. The results of the study indicate that regional taxes and regional levies simultaneously have a significant effect on the level of regional financial independence in East Java Province. Partially, Regional Taxes and Regional Retributions also have a positive and significant effect on the level of regional financial independence. The Determination Coefficient (R^2) shows that the independent variables are able to explain variations in regional independence substantially amounting to 88.8%.

Keywords: Regional Taxes; Regional Retributions; Regional Independence; SPSS 27.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banyaknya wilayah di Indonesia membuat pemerintah pusat kesulitan dalam mengatur seluruh daerah secara langsung. Oleh sebab itu, pemerintah mengubah kebijakan pusat dari yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi agar pelayanan dan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih mudah. Kebijakan desentralisasi ini diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki arti penyerahan sebagian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri (Silondae et al., 2023). Dasar utama diberlakukannya otonomi daerah adalah masyarakat ingin situasi di dalam negeri lebih terbuka dan mandiri dalam mengelola wilayahnya sendiri.

Pada saat melaksanakan otonomi daerah, kemandirian suatu daerah dapat diperhatikan dari seberapa besar kemampuan keuangan yang dimiliki untuk membangun daerahnya sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan sebagai bagian dari administrasi keuangan daerah. Bidang keuangan ini merupakan tanggung jawab dari terselenggaranya otonomi daerah dan juga salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Lukitawati, 2020). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan termasuk sumber keuangan yang ada di Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya pendapatan ini bisa menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah. Semua potensi penerimaan daerah perlu dimanfaatkan secara maksimal termasuk pajak dan retribusi daerah yang sudah lama menjadi bagian penting dari pendapatan daerah, tentu saja tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, memperkuat kesadaran atas kewajiban perpajakan, serta mendorong kemajuan yang signifikan di sektor perpajakan, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional secara lebih efisien, dengan memaksimalkan potensi sumber daya pajak dari dalam negeri (Aginanda & Wahyuni, 2024). Kemandirian keuangan ini memperlihatkan kemampuan Pemerintah Daerah membiayai sendiri berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi tersebut.

Kajian Pustaka

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat setempat (Manengkey et al., 2025). Pengaturan pajak daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, yang mengatur jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai tingkatannya. Rumus pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan pajak daerah yaitu dengan menggunakan rumus rasio, sebagai berikut (Aprillia & Kurnia, 2022):

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan. Berbeda dengan pajak yang bersifat umum dan dipungut tanpa imbalan langsung, retribusi dikenakan hanya kepada pihak yang menggunakan atau menikmati jasa tersebut, sehingga terdapat hubungan langsung antara pembayaran dan manfaat yang diterima (Simbolon et al., 2022). Rumus pengukuran yang dipakai Aprillia & Kurnia (2022) dalam mengukur tingginya penerimaan retribusi daerah yaitu dengan menggunakan rumus rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemandirian Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah memiliki kemampuan untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara mandiri, dalam rangka menerapkan asas desentralisasi. Hal ini

mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta peranan kepada masyarakat yang berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan utama (Sudirno & Mulyani, 2021). Pengukuran rasio tingkat kemandirian yang dilakukan Aprillia & Kurnia (2022) melandasi pengukuran rasio tingkat kemandirian keuangan dalam penelitian ini yang diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

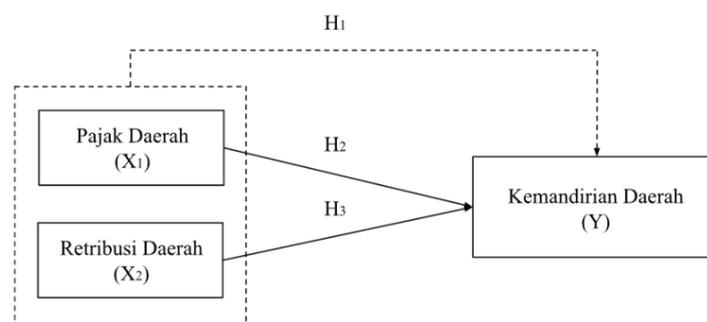
Tujuan Penelitian

Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam menjalankan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pada provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang memiliki banyak sumber daya untuk bisa menjadi pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari 25 kabupaten dan 9 kota. Banyaknya objek wisata di wilayah ini bisa menjadi sumber pajak yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Adapun juga untuk meningkatkan pemasukan dari retribusi ke pemerintahan pada beberapa kota dan kabupaten Provinsi Jawa Timur terdapat lahan pertanian yang luas yang sudah lama menjadi sumber penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Tujuan lainnya adalah mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, serta mengkaji peran pajak dan retribusi daerah dalam rasio tersebut. Lalu mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan pertanian. serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, khususnya di wilayah dengan potensi sumber daya yang beragam seperti Provinsi Jawa Timur.

Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

H2: Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

H3: Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kausalitas. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis datanya bersifat kuantitatif dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini melihat hubungan antar variabel secara kausal, yaitu hubungan sebab-akibat, sehingga terdapat variabel independen (sebab) dan (akibat). Selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menguji hubungan antarvariabel ekonomi daerah pada satu periode waktu yang sama, yaitu tahun 2023, di 34 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Bahan-bahan dari sumber sekunder ini dianggap sebagai data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sehingga tetap harus diberi perlakuan dan pengolahan yang sama (Nasution, 2008). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu Dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada situs www.jatim.bps.go.id, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS 27, yang memungkinkan pengolahan dan analisis data secara efisien. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah, sedangkan variabel dependen adalah kemandirian daerah yang diukur melalui rasio kemandirian fiskal. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal (Umar, 2011). Uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Bisa dikatakan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka residual berdistribusi normal dan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut memiliki data residualnya berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik tidak multikolinearitas. Multikolinearitas mengindikasikan adanya hubungan linier yang kuat atau sempurna di antara beberapa atau seluruh variabel bebas dalam model regresi (Ajija et al., 2011). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian terdapat korelasi antar variabel

bebas (independen) (Ghozali, 2016). Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi. Berbeda saat nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , hal ini berarti telah terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan dalam pengujian apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Juliandi et al., 2014). Model regresi dikatakan baik apabila heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidak heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu diuji menggunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (Gujarati, 2004). Pada pengujian ini apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara X_1 (variabel independen) dan X_2 (variabel independen) terhadap Y (variabel dependen) (Mauludi, 2020). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dituliskan sebagai: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X_1 = Variabel independen

X_2 = Variabel independen

a = nilai Y saat X bernilai 0 (bilangan konstanta)

b = koefisien regresi

Koefisien regresi, yang menunjukkan besarnya peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen. Jika nilai b positif maka terjadi kenaikan, jika negatif maka terjadi penurunan.

5. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai *customized R-Squared* (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada *R-square* (R^2) yang tercantum pada tabel Model *Summary*. Menurut Sugiyono (2017), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berada dalam rentang antara nol (0) hingga satu (1). Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol (0), maka kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel independen dalam menimbulkan keberadaan variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2017).

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan F digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan menggunakan statistik Anova sebagai bentuk pengujian hipotesis untuk menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik. Pengambilan keputusan dalam uji ini dilakukan dengan melihat nilai F pada tabel ANOVA, Tingkat yang digunakan adalah 0.05 atau 5%. Jika nilai signifikansi $F < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen begitu pula sebaliknya. Selain itu apabila nilai F hitung $> F$ tabel maka dikatakan variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini diketahui nilai

F tabel diperoleh dari rumus $df(N1) = k-1$ dan $df(N2) = n-k$, sehingga $df(N1) = 2-1 = 1$ dan $df(N2) = 34-2 = 32$. Maka nilai F tabel pada penelitian ini adalah 3,30.

7. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sujarweni (2019), uji t merupakan pengujian terhadap koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (X1 dan X2) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Sujarweni, 2019). Uji t (*t-test*) merupakan salah satu test statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean (rata-rata) sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudijono, 2010). Keputusan dalam uji t diambil dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Umumnya dasar pengujian hasil regresi menggunakan taraf signifikansinya 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Selain itu Jika nilai t hitung $> t$ tabel hal ini juga menunjukkan variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen Ghazali (2016). Pada penelitian ini diketahui nilai t tabel adalah 2,039 diperoleh dari $t \text{ tabel} = t(a/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 34-2-1) = (0,025 ; 31) = 2,039$.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian uji asumsi klasik ini memakai SPSS 27 dan memperoleh hasil output sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

N			34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,03244313
Most Extreme Differences	Absolute		,139
	Positive		,139
	Negative		-,128
Test Statistic			,139
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,096
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,097
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,090
		Upper Bound	,105

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,096 > 0,05$ yang berarti bahwa data yang diteliti terdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,117	,013		9,257	,000	
Pajak Daerah	,968	,085	,942	11,392	,000	,526
Retribusi Daerah	,006	1,317	,000	,005	,996	,526

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Pajak Daerah (X1) dan variabel Retribusi Daerah (X2) adalah $1,900 < 10$ serta nilai *tolerance value* $0,526 > 0,1$. Hal ini berarti data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	,027	,008		3,292	,002
Pajak Daerah	,058	,056	,250	1,026	,313
Retribusi Daerah	-,791	,869	-,221	-,910	,370

Sumber : SPSS 27

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel pajak daerah adalah $0,313 > 0,05$ lalu variabel retribusi daerah nilai signifikansi adalah $0,370 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,943 ^a	,888	,881	,03347

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang disajikan pada tabel diatas, melalui persamaan $Y = a + b1.X1 + b2.X2 = 0,117 + 0,968X1 + 0,006X2$. Nilai a sebesar 0,117 merupakan konstanta atau keadaan variabel kemandirian daerah belum dipengaruhi variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2). Nilai b1 merupakan nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,968 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian daerah (Y) yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel pajak daerah maka akan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 0,968. Nilai b2 merupakan nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,006 menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemandirian daerah berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel retribusi daerah maka akan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 0,006.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,943 ^a	,888	,881	,03347

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui nilai *R Square* sebesar 0,888 artinya variabel kemandirian daerah dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah sebesar 88,8% dan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (F)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,943 ^a	,888	,881	,03347

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan uji simultan (F) menunjukkan bahwa hasil F hitung sebesar 123,361 > F tabel 3,30 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa variabel pajak dan retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap variabel kemandirian daerah. Maka hipotesis pertama (H1) diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (T) Variabel Pajak Daerah (X1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,117	,008		14,701	,000
Pajak Daerah	,969	,061	,943	15,959	,000

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan uji parsial (T) diperoleh data variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 15,959 > t tabel 2,039 yang berarti variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kemandirian daerah. Maka hipotesis kedua (H2) diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (T) Variabel Retribusi Daerah (X2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,088	,028		3,169	,003
Retribusi Daerah	10,336	2,142	,649	4,824	,000

Sumber : SPSS 27

Berdasarkan uji hipotesis (T) diperoleh data variabel retribusi daerah (X2) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,824 > t tabel 2,039 yang berarti variabel retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kemandirian daerah. Maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Semakin meningkat pajak dan retribusi daerah, maka kemandirian daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak dan retribusi daerah menurun maka kemandirian daerah akan rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khasanah & Susilowati (2025) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian daerah. Dari penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, dengan arti bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Semakin meningkat besaran pajak daerah, maka kemandirian daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah menurun maka kemandirian daerah akan rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, hal ini tentu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peningkatan penerimaan pajak daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, yang pada gilirannya mendukung kemandirian daerah. Kemandirian daerah yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dan program-programnya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana alokasi dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerimaan pajak daerah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, pajak daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah secara mandiri. Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yang berarti pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel retribusi daerah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Dapat diartikan bahwa semakin meningkat besaran retribusi daerah, maka kemandirian daerah akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila retribusi daerah menurun maka kemandirian daerah akan rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ariyo Dewantoro, 2022) menyatakan bahwa retribusi memiliki pengaruh positif signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan retribusi daerah memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Retribusi daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi izin usaha, berkontribusi langsung terhadap PAD. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola dan membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah secara mandiri. Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

Hasil keseluruhan dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2023, pajak dan retribusi daerah di 34 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah secara simultan. Hal ini menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor penting dalam mendorong kemandirian daerah di wilayah tersebut. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri aktivitas pemerintah tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif perlu lebih diperhatikan untuk meningkatkan kemandirian daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh suatu kabupaten/kota. Pajak daerah menjadi komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Retribusi daerah secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Retribusi dari pelayanan publik dan perizinan yang dikelola secara baik dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah.
3. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan perubahan variabel dependen, yaitu tingkat kemandirian daerah.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi potensi pajak serta retribusi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian yang menjadi kekuatan utama di banyak wilayah Jawa Timur. Strategi yang terarah dan berbasis data diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
5. Pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui peningkatan PAD dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Disarankan untuk lebih menggali potensi pajak daerah secara maksimal, khususnya pada sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perhotelan, dan kendaraan bermotor, dengan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala.
 - b. Peningkatan efisiensi pemungutan retribusi daerah juga penting dilakukan, terutama pada sektor jasa publik seperti pelayanan pasar, perizinan, parkir, dan pengelolaan fasilitas umum.
 - c. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pajak dan retribusi daerah agar pengelolaan pendapatan dapat dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

2. Pemerintah Provinsi dan Pusat
 - a. Diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis, regulasi yang mendukung, serta insentif fiskal kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan melalui pajak dan retribusi.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi kebijakan fiskal antar-tingkatan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat kemandirian fiskal daerah.
3. Akademisi dan Peneliti

Disarankan untuk melanjutkan penelitian serupa dengan mempertimbangkan variabel lain yang turut mempengaruhi kemandirian daerah seperti Dana Perimbangan, Belanja Modal, Investasi, atau Tata Kelola Pemerintahan, serta memperluas cakupan waktu agar hasilnya lebih akurat dan generalis.
4. Masyarakat

Perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, karena kemandirian fiskal yang baik akan berdampak pada kualitas layanan publik dan pembangunan daerah yang lebih merata.

REFERENSI

- Aginanda, L., & Wahyuni, E. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 327–345.
- Ajija, S. R., Al, E., Rtal, & Al, E. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. www.djpkpd.go.id.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometric* (Edisi 4). McGraw-Hill Inc.
- Juliandi, A., Manurung, S., & Irfan. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Khasanah, C. P., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747–758.
- Lukitawati, L. J. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxation and Auditing (JATA)*, 1(2).
- Manengkey, T. A., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2025). Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. 3(2), 148–156. <https://doi.org/10.58784/rapi.292>
- Mauludi, A. (2020). *Analisis Data dengan Statistik*. Alim's Publishing.
- Nasution, S. (2008). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Sinar Grafika.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *e-Proceeding of Management*, 9(5), 3095–3104.
- Silondae, S., Nasrul, & Adam, L. O. B. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 306–315.

- Simbolon, J. L., Daulay, K. S., & Nainggolan, S. C. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EMBA)*, 3(2), 750–759.
- Sudijono, A. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2021). Analisis Retribusi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 516–521. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1511>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers.